



**2018**

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Inspektorat Kota Magelang**

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2  
Magelang 56101

(0293) 363646

inspektoratmglkota@yahoo.com



**LKjIP**

## *Kata Pengantar*

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kota Magelang menyusun LKjIP Tahun 2018 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Magelang, Januari 2019  
Inspektur Kota Magelang

SUMARTONO, SE.MM  
Pembina Utama Muda, IV/c NIP  
19600706 198602 1 008

## *Ikhtisar Eksekutif*

Inspektorat Kota Magelang sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintahan

Kota Magelang dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kota Magelang secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Magelang tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kota Magelang **“Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”** melalui misi ke satu (1) yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-gov* dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Magelang tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH;
2. Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan;
3. Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4. Peningkatan sinergitas penerapan SPI pada OPD.

Kategori keberhasilan capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian  $\geq 95\%$  kategori Sangat Berhasil,  $80 < 95\%$  kategori Berhasil,  $50 \leq 80\%$  kategori Cukup Berhasil dan capaian  $< 50\%$  kategori Kurang Berhasil.

Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan, Inspektorat Kota Magelang menetapkan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti, tahun 2018 target 35% terealisasi 56,29%;
2. Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil review, tahun 2018 target 80 % terealisasi 85,71%;
3. Prosentase LKJIP OPD dengan nilai baik, tahun 2018 target 45% terealisasi level 62,07%;
4. Nilai hasil LKJIP Tahun 2018, Target nilai BB terealisasi B;
5. Prosentase OPD yang di review LKJIP tahun 2018, target 45 % terealisasi 62,07%;
6. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, target 95% terealisasi 85,24% tidak terealisasi karena adanya pemeriksaan tematik yang tindak lanjutnya belum bias dilaksanakan secara maksimal;
7. Temuan ketidakpatuan UU hasil pemeriksaan BPK menurun target 50% terealisasi 50%;
8. Penurunan kasus temuan LKPD, target 1 terealisasi 50%;
9. Penyelesaian TLHP BPK meningkat target 95% terealisasi 85,24 % karena adanya pemeriksaan tematik yang tindak lanjutnya belum di laksanakan secara maksimal;
10. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal target 95% terealisasi 100%;
11. Prosentase cakupan pemeriksaan (dirincidari obrik,OPD,Saker dan BUMD plus targetnya) target 85% terealisasi 100%;
12. Prosentase aparat SPIP aktif target 65% terealisasi 55,17 % karena kekurangan jumlah kuota APIP yang seharusnya (kekurangan Auditor);
13. Prosentase kebijakan system dan prosedur pengawasan target 80% terealisasi 100%;

14. Level APIP Kota Magelang menjadi Level 3, target Level 2 terealisasi Level 3;
15. Prosentase APIP yang bersertifikat kopentensi meningkat target 65% terealisasi 100%;
16. Prosentase APIP yang bersertifikasi penunjang meningkat target 70% terealisasi 100%;
17. Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP, target 75% terealisasi 96,56%;
18. Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil pemeriksaan APIP ,target 50% terealisasi 1,01% (DO tidak sesuai);
19. Prosentase Implementasi SPIP, target 78 % terealisasi 55,17%;

Sedang apabila dilihat dari penetapan kinerja maka ditetapkan 4 (empat) sasaran kinerja strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 sebanyak 10 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 70,74% kategori cukup berhasil;
2. Sasaran 2 sebanyak 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 85,06% kategori berhasil;
3. Sasaran 3 sebanyak 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 100% katagori sangat berhasil;
4. Sasaran 4 sebanyak 3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 75,87% katagori cukup berhasil;

Permasalahan/kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Penetapan sasaran dan indikator kinerja pada SKPD belum seluruhnya berorientasi hasil, metode pengukuran belum ditetapkan dan belum adanya basis data yang memadai.
2. Belum seluruh personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
3. Tindaklanjut yang melibatkan pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor sangat lambat perkembanganya.
4. Belum seluruh personil memahami dengan baik PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Tambahan tugas-tugas baru dari berbagai Kementrian terkait terhadap APIP

Adapun Strategi/upaya pemecahan masalah melalui:

1. Reviu dokumen perencanaan secara berkala dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan melalui system e-Sakip.
2. Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala.
3. Penagihan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala melalui kedinasan maupun pendekatan personal.
4. Pemantauan penerapan PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Menyusun prioritas kegiatan pengawasan dan melaksanakannya sesuai dengan pedoman yang berlaku.

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	vi
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan .....	1
C. Aspek Strategis Pengawasan .....	3
D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan .....	4
E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan .....	5
F. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2018 .....	6
BAB II Perencanaan Kinerja .....	7
A. Perjanjian Kinerja.....	7
B. Indikator Kinerja Utama .....	9
BAB III Akuntabilitas .....	13
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	13
B. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	14
C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	15
D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis .....	16
E. Akuntabilitas Keuangan .....	20
BAB IV Penutup .....	24

## LAMPIRAN

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; reviu dan evaluasi kinerja.

### B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Inspektorat Kota Magelang.

Inspektorat Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat



menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugawan Walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Magelang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung sebagai berikut:

- Inspektorat Kota Magelang didukung oleh 30 (tiga puluh) Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

✚ Pejabat Eselon II	sebanyak 1 orang
✚ Pejabat Eselon III	sebanyak 4 orang
✚ Pejabat Eselon IV	sebanyak 2 orang
✚ Pejabat Fungsional	sebanyak 17 orang
✚ Staf	sebanyak 6 orang

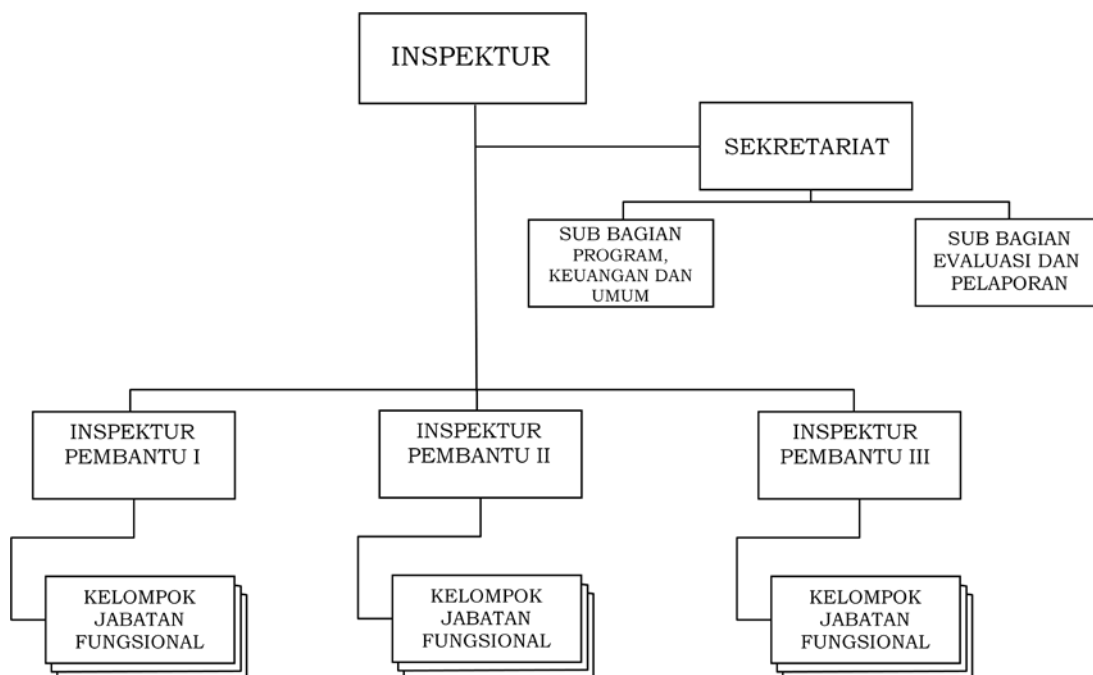
Komposisi jenjang pendidikan pegawai yang ada di Inspektorat yaitu Magister (S2) sebanyak 6 (enam) orang, S1 sebanyak 18 (delapan belas) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang, SMA sebanyak 3 (tiga) orang dan SMP sebanyak 1 (satu) orang.

- Sarana prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:
  - ✚ Mesin Ketik Elektrik sebanyak 1 (satu) buah
  - ✚ Perangkat Komputer berupa Personal Komputer sebanyak 20 (dua puluh) unit, notebook/laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit, printer inkjet/laserjet sebanyak 21 (dua puluh satu) serta scanner sebanyak 1 (satu) unit

- ✚ LCD Proyektor + screen brite sebanyak 1 set
- ✚ Wireless sound sebanyak 1 unit
- ✚ Sarana transportasi berupa kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 15 (lima belas) unit
- ✚ Peralatan/perengkapan kerja berupa meja, kursi dan lain-lain yang cukup tersedia.

### Susunan Organisasi

#### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MAGELANG



Perda No. 3 tahun 2016

### C. Aspek Strategis Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat Kota Magelang merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Magelang menghadapi tantangan:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Tingginya tuntutan stakeholder atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019;
3. Adanya komitmen pemimpin daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
4. Penguatan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010–2025.

#### **D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan**

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan SPIP belum optimal;
2. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan pada satuan unit kerja belum tertib;
3. Respon penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja belum optimal;
4. Belum ada unit kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);

5. Reviu berkala atas cascading antara Pemkab ke SKPD belum optimal;
6. Penerapan elemen dalam kerangka kapabilitas APIP belum optimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Tingkat maturitas SPIP masih pada level 3 dari skala 1-5;
2. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh satuan unit kerja harus diselesaikan 60 hari setelah laporan diterima;
3. Pengelolaan barang inventaris dan barang persediaan yang tertib pada satuan unit kerja merupakan bagian dalam mempertahankan Opini WTP;
4. Peningkatan indeks Reformasi Birokrasi;
5. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Lembaga APIP pada tahun 2019 harus mencapai level 3.

#### **E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan**

Inspektorat Kota Magelang sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Magelang, berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kota Magelang **“Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kota Magelang misi yang ke satu (1) yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-gov* dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi tersebut Inspektorat Kota Magelang menetapkan strategi pengawasan melalui:

1. Melakukan pendampingan dan asistensi kepada SKPD;
2. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit.

Berdasarkan strategi pengawasan tersebut diatas, Inspektorat Kota Magelang telah ditetapkan kebijakan yaitu:

1. Peningkatan penerapan SPIP;
2. Mengawal tercapainya opini WTP;
3. Mengawal peningkatan implementasi SAKIP;
4. Mendorong kepatuhan SKPD terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Mengawal terbentuknya unit kerja WBK/WBBM;
6. Mewujudkan APIP yang efektif.

## **F. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2018**

Kata Pengantar  
Ikhtisar Eksekutif  
Daftar Isi

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Kelembagaan
- C. Aspek Strategis Pengawasan
- D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan
- E. Strategi dan Kebijakan Pengawasan
- F. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2018

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Indikator Kinerja Utama

### **BAB III Akuntabilitas**

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
- E. Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV Penutup**

LAMPIRAN

## BAB II

# Perencanaan Kinerja

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Magelang tahun 2018 seperti dibawah ini:

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	1. Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	40%
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review	85%
		3. Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	60%
		4. Nilai LKJIP SKPD	BB
		5. Persentase SKPD yang direview LKJIP	55%
		6. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	96%
		7. Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun	40%
		8. Penurunan kasus temuan LKPD	

			1
		9. Penyelesaian TLHP BPK meningkat	100 %
		10. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	100 %
2.	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	11. Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya);	70%
		12. Persentase aparat SPIP aktif;	70%
		13. Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan;	85%
3.	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	14. Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	Level 3
		15. Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat;	70%
		16. Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat;	75%
4.	Meningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD	17. Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP;	70%
		18. Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	40%
		19. Persentase implementasi SPIP;	84%

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 3.516.071.000,00

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan System pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
6. Program Peningkatan Professional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan System dan Prosedur Pengawasan.
8. Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal.

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Inspektorat Kabupaten Sleman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 sebagai berikut:









1. Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review
3. Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik
4. Nilai LKJIP SKPD ;
5. Persentase SKPD yang direview LKJIP
6. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
7. Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun
8. Penurunan kasus temuan LKPD;
9. Penyelesaian TLHP BPK meningkat
10. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;
11. Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya);
12. Persentase aparat SPIP aktif;
13. Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan;
14. Level APIP Kota Magelang menjadi level 3;
15. Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat;
16. Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat;
17. Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;
18. Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;
19. Persentase implementasi SPIP;





**PENJABARAN  
RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2018**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
<p>Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur professional dan berintegritas.</p>	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif</p>	<p>Peningkatan kualitas system manajemen kinerja pemerintahan yang professional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi</li> <li>2. Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD</li> <li>4. Melaksanakan review dan Evaluasi atas LKjIP dan Rekomendasi atas hasil review yang dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengawasan sistem internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li> </ol> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Evaluasi LAKIP</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li> </ol> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Tindak Lanjut Temuan Pengawasan</li> <li>✚ Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala</li> <li>✚ Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</li> </ol> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Evaluasi LAKIP</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</li> </ol> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Review Laporan Keuangan</li> <li>✚ Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Anggaran</li> <li>✚ Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
			<p>5. Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP di semua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja</p> <p>6. Mengoptimalkan Review dan Evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota</p> <p>7. Melakukan Evaluasi Terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD</p> <p>8. Meningkatkan kapabilitas APIP</p>	<p>Kegiatan:   Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan:   Evaluasi LAKIP</p> <p>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan:   Evaluasi LAKIP</p> <p>1. Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD</p> <p>Kegiatan:   Inventarisasi Temuan Pengawasan</p> <p>2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan:   Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan   Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan</p> <p>1. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</p> <p>Kegiatan:   Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan   Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
			<p>9. Penataan dan implementasi system dan prosedur pengawasan keuangan</p> <p>10. Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD</p> <p>11. Optimalisasi peran Aparat Pengawas internal Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD</p>	<p>✦ Pengelolaan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor</p> <p>✦ Pengembangan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah</p> <p>1. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penyusunan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>1. Program Sinergitas Penerapan SPI pada SKPD</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>✦ Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif</p> <p>1. Program Sinergitas Penerapan SPI pada SKPD</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p>



## **BAB III**

### ***Akuntabilitas Kinerja***

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95 s/d 100 : Sangat Berhasil

80 s/d <95 : Berhasil

50 s/d <80 : Cukup Berhasil

0 s/d <50 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

**B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti;	%	35%	56,29%	160,83%
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review;	%	80%	85,71%	107,14%
3	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik;	%	45%	62,07%	137,93%
4	Nilai LKJIP SKPD	Level	BB	B	B
5	Persentase OPD yang direview LKJIP;	%	45%	62,07%	137,93%
6	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	%	95%	85,24%	89,73%
7	Penurunan kasus temuan LKPD;	%	1	50%	500%
8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat;	%	95%	85,24%	89,73%
9	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	%	95%	100%	105,26%
10	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya);	%	65%	100%	153,85%
11	Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan;	%	80%	100%	125%
12	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3;	Level	2	3	150%
13	Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat;	%	65%	100%	153,85%
14	Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat;	%	70%	100%	142,86%
15	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP;	%	75%	96,56%	128,75%
16	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	%	50%	1,01%	2,02%
17	Persentase implementasi SPIP;	%	78%	55,17%	70,73%
18	Prosentase aparat SPIP aktif ;	%	65%	55,17%	84,88%
19	Temuan ketidak patuan UU hasil pemeriksaan BPK menurun;	%	50%	50%	100%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2017	2018
1	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti;	57,62%	56,29%
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review;	100%	85,71%
3	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik;	40%	62,07%
4	Nilai LKJIP SKPD	CC	B
5	Persentase SKPD yang direview LKJIP;	58,62%	62,07%
6	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	89,02%	85,24%
7	Penurunan kasus temuan LKPD;	114.29%	50%
8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat;	89%	85,24%
9	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	100%	100%
10	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya);	95%	100%
11	Persentase zona integritas yang terbentuk;	5%	0%
12	Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan;	100%	100%
13	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3;	2	3
14	Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	46,15%	53%
15	Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	100%	100%
16	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP;	73,46%	96,56%
17	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	62,35%	60%
18	Persentase implementasi SPIP;	50%	1,01%
19	Prosentase aparat SPIP aktif ;	51.72%	55.17%
20	Temuan ketidak patuan UU hasil pemeriksaan BPK menurun;	85,69%	50%

Indikator kinerja pengawasan dalam mendukung mewujudkan misi Kota Magelang dapat ditunjukkan melalui implementasi SPIP pada unit kerja, penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, dan capaian tingkat kapabilitas APIP dari capaian indikator tersebut terlihat selama 2 tahun terakhir realisasi kinerja dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan Sasaran Strategis pada tahun sampai dengan tahun 2018 dapat diwujudkan.

### C. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari 4(empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 19 (Sembilan belas) indikator kinerja untuk tahun 2018 ada 20 (dua puluh)



Indikator karena tahun 2017, Indikator Prosentase Zone Integritas yang terbentuk masuk ke Indikator Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Magelang, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Magelang adalah sebagai berikut:

No Kinerja	Predikat	Jumlah Indikator
1	Sangat Berhasil	17
2	Berhasil	1
3	Cukup Berhasil	1
4	Kurang Berhasil	0
	Jumlah	19

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	95 s/d 100
1	Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	10	74		Cukup berhasil		
2	Meningkatnya penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	3	143				Sangat berhasil
3	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	3	99				Sangat Berhasil
4	Meningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD	3	73		Cukup Berhasil		

#### D. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

##### Sasaran 1 :

**“Meningkatnya Meningkatkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH “**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 74% dengan predikat *cukup Berhasil*

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti;	%	35%	56,29%	160,83%
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review;	%	80%	85,71%	107,14%
3	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik;	%	45%	62,07%	137,93%
4	Nilai LKJIP SKPD	Level	BB	B	B
5	Persentase SKPD yang direview LKJIP;	%	45%	62,07%	137,93%
6	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	%	95%	85,24%	89,73%
7	Penurunan kasus temuan LKPD;	%	1	0,50%	500%
8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat;	%	90%	89,02%	99%
9	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	%	60%	53,12%	88%
10	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	%	90%	90%	100%
11	Persentase zona integritas yang terbentuk;	%	10%	10%	100%

**Sasaran 2 :****“Meningkatnya penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan “**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan **penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan** dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 143% dengan predikat *sangat Berhasil*

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan;	%	75%	100%	133%
2	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD,	%	85%	100%	106%

3	saker dan BUMD plus targetnya); Prosentase aparat SPIP aktif ;	%	65%	55,17%	84,87%
---	-------------------------------------------------------------------	---	-----	--------	--------

**Sasaran 3 :****“Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan “**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 148 % dengan predikat *Sangat Berhasil*

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3;	Level	2	3	150,00%
2	Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat;	%	65%	100%	153,85%
3	Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat;	%	70%	100%	142,86%

**Sasaran 4 :****“Mningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD “**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Meningkatkan sinergitas penerapan SPI pada OPD dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 67,17 % dengan predikat *cukup Berhasil*

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP;	%	75%	96,56%	128,75%
2	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	%	50%	1,01%	2,02%
3	Persentase implementasi SPIP;	%	78%	55,17%	70,73%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2017	2018
<b>Sasaran 1 : “Meningkatnya Meningkatkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH “</b>			
1	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektora yang ditindaklanjuti;	35%	56,29%
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review;	80%	85,71%
3	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik;	45%	62,07%
4	Nilai LKJIP SKPD	BB	B
5	Persentase SKPD yang direview LKJIP;	45%	62,07%
6	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;	95%	85,24%
7	Penurunan kasus temuan LKPD;	1	50%
8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat;	95%	85,24%
9	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	95%	114%
10	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	100%	100%
11	Persentase zona integritas yang terbentuk;	0%	0%
<b>Sasaran 2 : “Meningkatnya penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan “</b>			
1	Persentase kebijakan system dan prosedur	80%	100%

	pengawasan;		
2	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya);	65%	100%
3	Prosentase aparat SPIP aktif ;	65%	55,17%
<b>Sasaran 3 : “Meningkatnya penataan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan “</b>			
1	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3;	2	3
2	Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	65%	100%
3	Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	70%	100%
<b>Sasaran 4 : “Meningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD “</b>			
1	Persentase implementasi SPIP;	78%	55,17%
2	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	50%	1.01%
3	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasilpemeriksaan APIP;	75%	96,56%

#### E. Akuntabilitas Keuangan

Aspek keuangan sebagai unsur penunjang pelaksanaan kegiatan rutin Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

Adapun perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut::

**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2018**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	2.008.500,-	66,95
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.498.000,-	6.568.225,-	52.55
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.800.000,-	8.045.950,-	91.43
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	63.600.000,-	56.817.100,-	89.34
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.498.000,-	2.431.500,-	97,34
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,-	9.522.400,-	95.22
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,-	5.149.800,-	85.83
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,-	4.280.000,-	85.60
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	900.000,-	900.000,-	100.00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	39.993.000,-	32.195.050,-	80.50
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	142.168.000,-	134.729.100,-	99,76
12	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Kantor	472.222.000,-	429.861.000,-	91.03
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	56.550.000,-	37.691.000,-	66.65
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	113.097.000,-	105.392.000,-	93.19
15	Pengadaan Mebeler	47.672.000,-	43.397.000,-	91.03
16	Perencanaan Bangunan Gedung	276.217.000,-	239.924.000,-	86.86
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,-	1.000.000,-	20.00
18	Pemeliharaan	144.945.000,-	119.668.204,-	82.56

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	%
	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.200.000,-	19.026.500,-	94.19
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,-	9.685.500,-	96.86
21	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,-	1.995.500,-	99.78
22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.000.000,-	2.918.800,-	97.29
23	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD	4.000.000,-	4.000.000,-	100.00
24	Penyusunan Rencana Kerja dasn Anggaran OPD	10.000.000,-	8.813.500,-	88.14
25	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) SKPD	3.000.000,-	3.000.000,-	100.00
26	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	368.892000,-	313.600.700,-	85.01
27	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang	95.310.000,-	60.317.000,-	63.29
28	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	220.000.000,-	219.980.100,-	99,99
29	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	35.001.000,-	34.551.300,-	98.72
30	Review Laporan Keuangan	44.317.000,-	39.697.100,-	98.72
31	Penelitian Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P)	0,-	0,-	0
32	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	55.000.000,-	53.283.900,-	96.88
33	Pemantauan LHKPN/LHKASN	35.720.000,-	29.041.000,-	81.30
34	Penyelesaian Kerugian	173.106.000,-	147.585.700,-	85.26

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	%
	Negara			
35	Review dokumen perencanaan dan penganggaran	60.192.000,-	40.528.200,-	67.33
36	Review Pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran	33.432.000,-	28.058.500,-	83.93
37	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sapu bersih pungutan liar	131.800.000,-	103.630.300,-	78.63
38	Evaluasi LAKIP	45.500.000,-	38.903.500,-	85.50
39	Pelaporan/ Penyusunan Iktisar Laporan Hasil Pengawasan.	23.099.000,-	15.967.550,-	69.13
40	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama APIP-APH	10.399.000,-	10.392.500,-	99,94
41	Fasilitasi Kerjasama APIP-APH	161.574.000,-	148.545.000,-	91.94
42	Pengelolaan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor	29.999.000,-	24.373.500,-	81.25
43	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	163.034.000,-	127.706.200,-	78.33
44	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	58.081.000,-	46.951.500,-	80,84
45	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	18.264.000,-	17.476.500,-	95.69
46	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	49.660.000,-	40.400.800,-	81.35
47	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	40.000.000,-	35.882.400,-	89,71
48	Inventarisasi Temuan Pengawasan	50.000.000,-	47.702.600,-	95.41
49	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	80.000.000,-	63.009.000,-	78.76
50	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	66.331.000,-	54.945.000,-	82.83
51	Pengelolaan Website	5.000.000,-	4.999.000,-	99.98
	<b>Jumlah</b>	<b>3.516.071.000,-</b>	<b>3.036.549.479,-</b>	<b>86.36</b>



## BAB IV

### *Penutup*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Magelang Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Magelang tahun 2018 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2018 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Magelang tahun 2018 dengan 4 (empat) sasaran secara keseluruhan sangat berhasil.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Magelang, Januari 2019

INSPEKTUR KOTA MAGELANG

**SUMARTONO,SE.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600706 198602 1 008



**lampiran**

## PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Rata-rata
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti;	%	35	56,29	160,83	158,73
		Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil review	%	80	85,71	107,14	
		Prosentase I LKJIP OPD dengan nilai baik	%	50	62,07	137,93	
		Nilai LKJIP OPD	Nilai	BB	B	B	
		PersentaseSKPD yang di review LKJIP;	%	45	62,07	137,93	
		Prosentase Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK	%	95	85,24	89,73	
		Temuan Ketidapatuan UU hasil Pemeriksaan BPK Menurun	%	50	50	100	
		Penurunan Kasus temuan LKPD	%	1	50	500	
		Penyelesaian TLHP BPK meningkat;	%	95	85,24	89,73	
		Prosentase Tindak Lanjut hasil pemeriksaan aparatur Internal	%	95	100	105,26	
2	Meningkatnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan system dan prosedur pengawasan	Cakupan pemeriksaan (dirinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus Targetnya;	%	65	100	153,85	121,24
		Presentase Aparat SPIP Aktif	%	65	55,17	84,88	
		Presentase Kebijakan system dan Prosedur Pengawasan	%	80	100	125	

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Rata-rata
3	Meningkatnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Level APIP Kota Magelang menjadi Level 3	Level 2	2	3	150	148,90
		Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi Meningkat	%	65	100	153,85	
		Persentase APIP yang bersertifikat Penunjang Meningkat	%	70	100	142,86	
4	Meningkatnya Sinergitas penerapan SPI pada OPD	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP	%	75	96,56	128,75	67,17
		Penurunan temuan Ketidapatuan UU hasil Pemeriksaan APIP	%	50	1,01%	2,02	
		Prosentase Implementasi SPIP	%	78	55,17	70,73	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

*Inspektorat Kota Magelang*

**2018**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

*Inspektorat Kota Magelang*

**2018**

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA MAGELANG  
TAHUN 2016 – 2021**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Cara Mencapai Tujuan/Sasaran	
			Kebijakan	Program/Kegiatan
Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif	Peningkatan kualitas system manajemen kinerja pemerintahan yang professional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi	Program pengawasan sistem internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Melaksanakan review dan Evaluasi atas LKjIP dan Rekomendasi atas hasil review yang dilakukan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP di semua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Mengoptimalkan Review dan Evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Melakukan Evaluasi Terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD	Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Cara Mencapai Tujuan/Sasaran	
			Kebijakan	Program/Kegiatan
			Meningkatkan kapabilitas APIP	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
			Penataan dan implementasi system dan prosedur pengawasan keuangan	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
			Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD	Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD
			Optimalisasi peran Aparat Pengawas internal Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD	Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD

Magelang,  
INSPEKTUR KOTA MAGELANG

**SUMARTONO,SE.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600706 198602 1008





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARTONO

Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SIGIT WIDYONINDITO,

Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ttd

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

SUMARTONO

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018****INSPEKTORAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	1. Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil review 3. Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik 4. Nilai LKJIP SKPD 5. Persentase SKPD yang direview LKJIP; 6. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 7. Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun 8. Penurunan kasus temuan LKPD 9. Penyelesaian TLHP BPK meningkat 10. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal;	35%  80%  50% BB 45% 95%  40%  1 95% 95%
2	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	11. Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, saker dan BUMD plus targetnya); 12. Persentase aparat SPIP aktif; 13. Persentase kebijakan system dan prosedur pengawasan	65%  65% 80%
3	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	14. Level APIP Kota Magelang menjadi level 3 15. Presentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat; 16. Presentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat;	Level 2  65%  70%

	Meningkatnya sinergitas penerapan SPI pada OPD	17. Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP;	75%
		18. Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil Pemeriksaan APIP;	50%
		19. Persentase implementasi SPIP;	78%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 294.457.000,00	APBD
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 1.135.903.000,00	APBD
3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 32.000.000,00	APBD
4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 5.000.000,00	APBD
5. Peningkatan sitem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.493.342000,00	APBD
6. Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa Dan aparatur pengawasan	Rp. 251.114.000,00	APBD
7. Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan;	Rp. 107.924.000,00	APBD
8. Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	Rp. 196.331.000,00	APBD

Magelang , 31 Nopember 2018

WALIKOTA MAGELANG

INSPEKTUR KOTA MAGELANG

ttd

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

SUMARTONO